



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 4, No. 1
Januari-Juni 2020
Halaman: 44-55

Program Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Terangun Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)

Seri Murni, Analiansyah, Baihaqqi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 4 April 2020
Revisi 3 Mei 2020
Diterima 2 Juni 2020

Kata Kunci:

*Village Development,
Poverty Alleviation,
Islamic Economics.*

ABSTRACT

Village development is an important part of national development. However, the problems of poverty and unemployment are still factors that hinder the village development process. In Village Terangun, the economy is still at a low level in terms of the income of the population, the average work of the community is farming, livestock, and some work as laborers in developing areas. Seeing this condition, the government of Village Terangun made efforts to alleviate poverty. This research is a type of field research that is qualitative in nature. The results showed that the increase in living standards was not only an increase in income, but also included additional job opportunities, improvement in the quality of education, and increased attention to cultural and human values. The Village Development Program understands how to implement and empower communities in every development activity, by holding creative trainings aimed at alleviating poverty.

ABSTRAK

Pembangunan kampung merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Namun, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi faktor yang menghalangi proses pembangunan kampung. Di Kampung Terangun perekonomiannya masih taraf rendah dalam penghasilan penduduknya rata-rata pekerjaan masyarakat adalah bertani, berternak, dan ada juga yang menjadi buruh di daerah berkembang. Melihat kondisi tersebut pemerintah Kampung Terangun melakukan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Program Pembangunan Desa memahami bagaimana cara melaksanakan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kreativitas yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai kekayaan terbanyak, namun memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang besar pula. "Upaya menanggulangi kemiskinan dilakukan proses penguat penduduk miskin, yang mencakup lima aspek yaitu, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan modal kerja, penciptaan peluang dan kesempatan berusaha, pengembangan kelembagaan penduduk miskin, dan penciptaan sistem pelayanan kepada penduduk miskin yang sederhana dan efisien. Melalui jalur pendekatan tersebut, penduduk miskin diharapkan mampu, dengan kekuatan sendiri, menanggulangi kemiskinannya serta meningkatkan kesejahteraannya secara memadai dan berkelanjutan" (Nurman, 2015).

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah.

Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga, hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebab dan akibat (teori Nurkse) telah dibuktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia. Ada dua jenis

* Corresponding author: Baihaqqi
E-mail address: baihaqqiarga@gmail.com

lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran dan permintaan modal. Pertama, penawaran modal. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh produktivitas rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah.

Pada akhirnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Efek dari pembentukan modal rendah adalah negara menghadapi kekurangan barang modal, implikasinya tingkat produktivitas tetap rendah. Kedua, permintaan modal. Di negara miskin keinginan untuk menanamkan modal rendah. Hal ini lebih disebabkan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Di samping itu, pendapatan masyarakat juga rendah yang diakibatkan produktivitas mereka rendah. Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan suatu masyarakat. Oleh sebab itu wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mengantisipasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal tersebut.

Namun pada kehidupan nyata, masalah-masalah sosial terus menjadi bahan perbincangan dan bahkan menjadi agenda pembahasan negara yang sampai sekarang belum selesai pemecahannya. Salah satu masalah sosial tersebut adalah tentang pengentasan kemiskinan khususnya di negara Indonesia ini, sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang mencoba memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini (Soetomo, 2008).

Dalam pandangan Islam kemiskinan dianggap sebagai gangguan terwujudnya kesejahteraan sosial, atau paling tidak mempersulit realisasi kesejahteraan, karena wawasan ekonomi Islam lebih banyak memandang potensi alam yang di anugerahkan oleh Allah dari segi kecukupannya dari pada segi kekurangan atau kelangkaannya. Oleh karena itu jika kelangkaan itu muncul, maka akibat kesalahan orang dalam memanfaatkannya, melestarikan atau karena kebodohan dan kemalasannya. Kemiskinan dipandang oleh Islam sebagai penghambat sosial yang harus ditanggulangi (Muhammad Tholhah, 2005).

Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri perdesaan hadir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri sebagai prioritas mendesak, khususnya terhadap masyarakat perdesaan. PNPM-MD sebagai program penanggulangan kemiskinan di pedesaan lebih mengutamakan pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif (Angga Harahap, 2010).

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam telah memiliki paradigma yang holistik dan strategis. Pemberdayaan dalam konteks pembangunan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus memperbaiki taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi kemiskinan.

Tujuan diadakan program tersebut adalah untuk memberi ketrampilan, dan kerajinan dalam membentuk perekonomian perdesaan. Di daerah tersebut masih sulit pembangunan sarana dan prasarana pembangunan desa. Di daerah Tambakbulusan perekonomiannya masih taraf rendah dalam penghasilan penduduknya, rata-rata pekerjaan masyarakatnya adalah bertani, beternak, dan ada juga yang menjadi buruh di daerah berkembang.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Kampung

Istilah Kampung berasal dari bahasa melayu, kampung, yang berarti desa kecil, atau bagian dari desa yang memiliki sekumpulan rumah. Di Aceh ada istilah gampong, yang memiliki arti sama dengan kampung. Kampung merupakan suatu kesatuan lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari kesatuan keluarga-keluarga. Kumpulan sejumlah kampung disebut dengan desa. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.

Provinsi Aceh yang dengan keistimewaannya memiliki qanun nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Lahimnya qanun tersebut berdasarkan amanat keistimewaan Provinsi Aceh dilanjutkan dengan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) menjadi dasar pembangunan yang berkesinambungan baik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kedepan.

Karakteristik Perkampungan

Dalam beberapa kajian dibedakan antara masyarakat kota dan desa berdasarkan letak geografis kebiasaan dan karakteristik keduanya. Masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat.
2. Hubungan lebih bersifat homogen.
3. Struktur masyarakat bersifat homogen.
4. Tingkat mobilitas sosial rendah.
5. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsi sebagai unit ekonomi.

Adapun sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik kota dan kampung yaitu: mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha tani, usaha nelayan, ternak, kerajinan tangan dan pedagang kecil. Ciri lain yang nyata terlihat yaitu produksi pertanian yang ditekuni masyarakat terutama untuk memenuhi keperluan sendiri (Nurman, 2015). Secara psikologis masyarakat kampung cenderung suka curiga terhadap orang luar namun demikian masyarakat kampung dapat bersifat hemat, cermat, dan menghormati orang lain yang terkadang sulit ditemukan di perkotaan.

Pemerintahan Kampung

Kampung sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi.

Pemerintah kampung merupakan sub sistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa atau perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan. Susunan pemerintahan kampung terdiri dari Pemerintah kampung dan Badan Perwakilan Kampung. Pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat kampung yang bertanggungjawab langsung kepada kepala desa. BPK adalah badan perwakilan yang terdiri dari pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan kampung.

Susunan pemerintahan kampung terdiri dari Pemerintah kampung dan Badan Perwakilan Kampung. Pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat kampung yang bertanggungjawab langsung kepada kepala desa. BPK adalah badan perwakilan yang terdiri dari pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan kampung.

Dasar-dasar Pembangunan Kampung

Pembangunan kampung dan pembangunan masyarakat kampung sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya di dalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.

Pembangunan kampung dan pembangunan masyarakat kampung sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya di dalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.

Pada dasarnya pembangunan perkampungan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material serta spiritual berdasarkan Pancasila di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah, hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.

Otonomi

Otonomi dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Kampung adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, kampung telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia.

Prinsip utama otonomi adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah pedesaan. Selayaknya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit

wilayah kelola desa melalui aturan yang dibuat secara mandiri. Ciri paling kuat pemerintah desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong-royong. Dua ciri tersebut merupakan modal sosial yang jauh lebih penting dan potensial ketimbang modal keuangan.

Perencanaan Pembangunan Kampung

Pembangunan perkampungan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk wilayah perkampungan umumnya miskin.

Perencanaan pembangunan kampung merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Secara garis besar perencanaan kampung mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
2. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat rt/rw, dusun, dan desa.
3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat setempat.
4. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan.

Pembangunan Kampung Dalam Manajemen Pembangunan Daerah

Pembangunan kampung tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan kampung dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan antar kabupaten.

Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilihat dalam konteks pembangunan daerah. Hal itu tidak berarti menggugat atau memperlemah upaya otonomi desa tetapi justru memperkuat pembangunan di desa yang bersangkutan. Manajemen pembangunan daerah di tingkat kabupaten dan provinsi merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penetapan kebijakan program pembangunan daerah di segala bidang baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, budaya, agama dan keamanan. Hasilnya berupa dokumen rencana jangka pendek (1 tahun) dituang dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang terkait langsung dengan APBD, rencana jangka menengah (5 tahun) dituangkan dalam dokumen Program Pembangunan Daerah dan rencana jangka panjang dituangkan dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Rencana pembangunan daerah dapat mengakomodasikan kepentingan desa ke depan yang berada dalam koordinasinya, sehingga dapat mengakomodasikan kepentingan desa ke depan yang berbeda dalam koordinasinya, sehingga apa pun yang tertuang dalam dokumen tersebut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah, aspirasi serta memperkuat institusi lokal terutama di tingkat desa. Perencanaan pembangunan desa menghasilkan suatu dokumen RPJM yang logis dengan mempertemukan kebutuhan di tingkat daerah atau kabupaten, provinsi dan skala nasional dengan kebutuhan berskala lingkungan RT/RW/dusun dan desa.

Pengertian Kemiskinan

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berlindung, ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, serta tidak ada keterwakilan dan kebebasan. Sementara menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1981, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Ukuran Kemiskinan

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedang pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk

perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Penyebab Kemiskinan

Menurut pandangan secara umum, kemiskinan jika dilihat dari faktor penyebabnya, maka dibedakan atas : kemiskinan kultural, natural dan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti: malas, tidak disiplin, boros dan lain sebagainya. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti: karena cacat, sakit, lanjut usia, dan karena bencana alam. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti: distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil, korupsi dan kolusi, serta tatanan perekonomian yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

Pengentasan Kemiskinan

Ada beberapa sarana untuk mengatasi kemiskinan yaitu:

1. Bekerja

Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi, dan memanfaatkan rezeki pemberian Allah. Yang dimaksud dengan bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa.

Bekerja merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan dan juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah seizin Allah.

2. Jaminan sanak famili yang berkelapangan.

Islam memiliki prinsip orisinal di dalam syariatnya, ia menuntut setiap individu memerangi kemiskinan dengan senjata yang dimilikinya yaitu bekerja dan berusaha. Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah mereka dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Dalam kaitan ini, Islam membuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga.

Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu.

Dengan prinsip ini, hubungan antar famili dipererat, kesadaran saling membantu pun menjadi makin tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjalinnya hubungan silaturahmi yang kuat dan ikatan kekeluargaan yang kental.

3. Zakat.

Pada beberapa kesempatan Rasulullah Saw menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuan utamanya adalah menghapuskan kemiskinan. Zakat memiliki fungsi sosial yaitu sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan sosial.

4. Derma sukarela.

Islam selalu berusaha mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan dan berani berkorban. Yaitu pribadi yang bisa memberikan lebih banyak dari yang diminta, menginfakkan lebih dari yang diwajibkan, bahkan bisa memberi tanpa diminta sekalipun, dalam setiap situasi dan kondisi. Hal itu bisa tumbuh, berangakat dari kesadaran bahwa harta bukan tujuan, melainkan sebatas sarana. Sarana untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain.

5. Jaminan Baitul mal dengan segala sumbernya.

Dalam sistem Islam, sumber dana utama pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan dan mengangkat kehidupan kaum papa tidak hanya terbatas pada zakat. Semua dana yang terhimpun di Baitul mal yang berasal dari berbagai sumber juga harus didayagunakan untuk menghapuskan kemiskinan. Ketika perolehan zakat tidak dapat menutupi kebutuhan mereka yang memerlukan, harta kekayaan pemerintahan muslim yang terhimpun di Baitul mal dapat dipergunakan. Harta Baitul mal yang dimiliki pemerintah muslim terkumpul dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menjalankan usaha sendiri, menyewakan sesuatu, menjalankan sistem usaha bagi hasil, mengusahakan pertambangan, dan mengelola sektor-sektor vital bagi masyarakat umum. Kaum fakir dan miskin merupakan masalah sosial yang kompleks serta multidimensi.

Strategi

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Sedarmayanti, 2014).

Strategi merupakan parameter-parameter sebuah organisasi dalam pengertian menentukan tempat bisnis dan cara bisnis

untuk bersaing. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak di tempuh oleh suatu organisasi (perusahaan) untuk mencapai tujuannya. Sedangkan Menurut Kenneth R. Andrews, Strategi adalah suatu proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar produk yang menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan (Panji Anoraga, 2004).

Strategi memperhatikan arah jangka panjang dan cakupan organisasi. Strategi juga memperhatikan posisi organisasi itu sendiri dengan memperhatikan lingkungan dan keunggulan kompetitif, yang berkelanjutan sepanjang waktu, tidak dengan manuver teknis, tetapi dengan menggunakan perspektif jangka panjang (Jajuk Herawati dan Sunarto, 2004).

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang, hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir.

Strategi Penciptaan Wirausaha Baru

Penciptaan wirausaha baru, tentunya tidak semudah membalik telapak tangan, karena ternyata sangat sulit untuk mencari orang yang berjiwa *entrepreneur*. *Entrepreneur* sering diartikan sebagai orang yang mengambil resiko menanamkan uangnya untuk penemuan-penemuan baru (*innovation*), sedangkan *entrepreneurship* lebih menekankan jiwa kewirausahaan (kata sifat).

Hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat dan di Indonesia (seperti yang telah disebutkan di atas), mayoritas pengusaha yang sukses berasal dari keluarga dengan tradisi yang kuat di bidang usaha (bisnis). Sehingga dapat digarisbawahi bahwa kultur (budaya) berwirausaha suatu keluarga atau suku atau bahkan bangsa sangat berpengaruh terhadap kemunculan wirausaha-wirausaha baru yang tangguh.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai- nilai Islam. Ekonomi Islam memiliki misi demi terwujudnya persamaan martabat di antara umat manusia sehingga di sini perlu ditegakkan keadilan terutama dalam distribusi pendapatan. Sementara secara makro, misi ini mengarah kepada terwujudnya negeri yang baik, yang adil dan makmur, serta diridhai Allah SWT Karenanya, ekonomi Islam memiliki dasar yang berbeda dari sistem ekonomi lain, yang menurut Abu Saud, ada tiga konsep dasar ekonomi Islam: pertama, ilmu ekonomi dititik beratkan padausaha mencapai tujuan; kedua, beriman kepada ke-Esaan Allah; dan ketiga, dalam situasi apapun aturan Islam harus berlaku (Athoillah, 2013).

Secara umum ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi yang berlandaskan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan ukhrawi. Ekonomi Islam juga tidak sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam (Hakim, 2010).

Tujuan dari sistem Islam sangat berhubungan dengan semua aspek kehidupan. Hal ini tidak memerlukan pembahasan secara keseluruhan dan hanya terkait sasaran- sasaran yang secara langsung relevan dengan kehidupan ekonomi. Islam berusaha untuk mengatur kehidupan masyarakat sedemikian rupa sehingga setiap individu dapat beraktifitas sesuai kebebasan sebagai manusia dengan syarat mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini dilakukan dengan menjamin kebebasan setiap individu serta kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial yang tertib dengan peraturan yang adil.

Konsep Pembangunan Dalam Islam

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat (Titis Istikomah, 2015).

Sedangkan Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemikiran, gagasan, paradigma yang bersumber dari Al Qur'an dan hadis, serta ijtihad ulama' dengan metode (manhāj) yang dipilih oleh ulama' dalam menentukan nilai-nilai dasar Ekonomi (Ismail Nawawi, 2009).

Pembangunan dalam Islam diartikan sebagai menerima pembangunan asing, barat dan timur yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai Islam. Pembangunan Islam adalah pembangunan insyariah manusia sendiri. Pembangunan yang diajarkan Islam adalah pembangunan yang datangnya dari pada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerja sama dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil.

Pembangunan Islam adalah pembangunan insyariah manusia sendiri. Pembangunan yang diajarkan Islam adalah

pembangunan yang datangnya dari pada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerja sama dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil.

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam.

1. Prinsip Tauhid
2. Prinsip Nubuwah
3. Prinsip Kepemilikan
4. Prinsip Keseimbangan
5. Prinsip Keadilan
6. Prinsip Masalah Dan Manfaat
7. Prinsip Persaudaraan (*ukuwah*) dan Tolong-menolong (*ta'awun*)

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif, metode dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu (Haris Herdiansyah, 2012).

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dalam kehidupan yang sebenarnya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara para aparatur kampung dan beberapa masyarakat di kampung Tearangun. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Data Profil Kampung. Data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yaitu Kantor Keuchik Kampung Terangun.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara observasi, serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian program pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi islam, lalu di analisis menggunakan teori-teori tersebut sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Pengujian data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Interpretasi data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pembangunan Yang Sudah Berjalan

Berbicara mengenai upaya-upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pembangunan, tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah desa sendiri. Menyinggung perihal peran dari suatu kinerja, hal tersebut tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya kualitas. Kualitas dari tugas pemerintah desa yang dimaksud di sini adalah sejauh mana pemerintah desa mampu menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat.

Aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan perekonomian serta kepentingan rakyat desa secara umum. Selain itu, segala aktifitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan masyarakat secara signifikan di segala segi kehidupannya.

Membahas mengenai bagaimana dan seperti apa aktifitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka hal ini tidak akan terlepas dari tahapan-tahapan dalam bagaimana pemerintah desa melaksanakan suatu program, khususnya dalam hal ini adalah pemberdayaan melalui dana desa. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Terangun dalam meningkatkan kualitas dan pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sektor Jalan
2. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu
3. Menggiatkan program PKK melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Strategi Program Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan

Perencanaan pembangunan kampung merupakan suatu model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Dari teori tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan desa. Peran masyarakat dalam hal ini adalah analisa mengenai apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggungjawab.

Dalam wawancara dengan Bapak Abu Kasim mengatakan bahwa:

"Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya sampai pelaksanaannya, seperti ketika misalkan pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap kebutuhan, mereka hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, pembangunan jalan dan pembangunan madrasah diniyah misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan."

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Abu Kasim pemberdayaan yang berlangsung di Kampung Terangun. Tujuan dari pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai mengena pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam menganalisis kebutuhan masyarakat sendiri untuk bersama disepakati dalam Musdus dan Musbangdes sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*) Menurut Anwas (2014).

Pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan yang lainnya di pedesaan, kerap kali kurang berjalan dengan baik, dan fenomena seperti ini berlangsung beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebut- sebut diakibatkan karena terbatasnya anggaran yang terdapat di setiap pemerintahan desa, yang pada akibatnya program-program yang dilaksanakan di desa-desa tidak berjalan secara signifikan.

Selain itu, tidak sedikit desa di Indonesia yang dikategorikan tertinggal. Disaat wilayah perkotaan gencar akan program pembangunan dan penataan kotanya, wilayah pedesaan seakan-akan kurang mendapat perhatian, mungkin hampir disemua sektor. Kota dengan segala kemajuannya semakin terus maju, sedangkan desa seakan akan belum ada perkembangan.

Alasan-alasan seperti itulah yang pada akhirnya pemerintah pusat mulai mengucurkan dana untuk setiap desa di Indonesia, yang disebut dengan Dana Desa (DD). Dana yang dikucurkan tersebut dalam pelaksanaannya melihat pada keadaan desa itu sendiri, yang pada hal ini juga akan memengaruhi pada besaran dana yang akan diterima oleh desa tersebut. Misalnya melihat pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan yang lainnya. Dana desa ini diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya kebijakan seperti ini, maka sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap desa termasuk Desa Terangun untuk berbenah diri.

Sesuai dengan penjelasan diatas, kini program pembangunan di Desa Terangun mulai dilaksanakan. Perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya, Pemerintah Desa Terangun sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Terangun itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Terangun melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Desa Terangun terutama setelah adanya dana desa ini secara perlahan telah melaksanakan aktifitas dan perbaikan desa. Berbagai responpun muncul dari masyarakat, terutama terhadap aktifitas program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Terangun.

Berbagai upaya memang telah coba dilakukan oleh Pemerintah Desa Terangun guna meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal pembangunan. Selain itu, dalam pembangunan di Desa Terangun hanya baru sebatas pada ranah pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Dan kedepannya dana desa ini diharapkan betul-betul digunakan untuk program-program pembangunan tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja, serta tepat dana desa ini tepat guna, dan tepat sasaran.

Beberapa strategi pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Terangun dalam meningkatkan kualitas kampung terdiri dari:

1. Perbaikan akses jalan

Dalam pelaksanaan pembangunan kampung pada tahun 2015, Pemerintah Kampung Terangun telah melaksanakan

beberapa kegiatan, seperti pembangunan jembatan dan pembangunan jalan di dusun-dusun. Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, dikatakan bahwa:

“Dengan adanya pembangunan jembatan dan jalan yang dilakukan Pemerintah Desa Terangun di dusun-dusun diharapkan dapat mempermudah jalannya perekonomian di Kampung Terangun”

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kampung Terangun, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Terangun benar-benar dapat terasa manfaatnya.

2. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Kampung Terangun menyelenggarakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di kampung-kampung menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Selain itu pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan kesehatan ini.

Selain itu, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap kampung, serta dibarengi dengan pemberdayaan para kader-kader Posyandu, Pemerintah Kampung Terangun sendiri berharap masyarakat Terangun terutama para ibu hamil dan balita, mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, yang pada hakikatnya sangatlah penting mereka dapatkan terutama bagi para ibu hamil dan balita.

3. Menggiatkan program PKK melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Program ini dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, dari segi pemberdayaan ekonomi pun Pemerintah Kampung Terangun mengupayakan peningkatan-peningkatan, yaitu dengan mengadakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berasal dari program PKK dimana hal ini memiliki tujuan yang sangat positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, program dari KUB ini salah satunya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan. Dalam pemberdayaan PKK ini pemerintah kampung Terangun mengalokasikan dana yang berasal dari dana desa.

4. Menciptakan Program Kelompok Petani

Pemerintah Kampung Terangun juga menciptakan beberapa kelompok petani yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dari panen tersebut, salah satu programnya adalah memberi pelatihan serta memberikan fasilitas alat-alat pertanian yang dibeli dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk dipinjamkan kepada kelompok petani tersebut.

Peran kelompok tani sebagai penyedia unit produksi adalah kemampuan kelompok dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan anggotanya, sehingga mampu meningkatkan skala ekonomis usaha yang dijalankan oleh kelompok maupun anggota kelompok dengan menjaga kuantitas maupun kontinuitas.

5. Mendirikan BUMK (Badan Usaha Milik Kampung)

Dalam wawancara dengan bapak Alamudin, untuk pembangunan desa terdapat rencana jenis usaha yang akan dikembangkan melalui BUMK diantaranya:

1. Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Kampung Terangun. Besar pinjaman uang tiap orang berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah dengan bunga sekitar 1-2%. Unit usaha simpan pinjam dianggap sebagai usaha yang operasionalnya lebih mudah dibanding unit usaha lain karena unit usaha simpan pinjam tidak terlalu membutuhkan banyak modal dan tidak membutuhkan banyak keahlian di bidang marketing. Usaha simpan pinjam mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat.

Adapun Kontribusi BUMK terhadap masyarakat Kampung Terangun memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan melalui berbagai jenis bentuk unit usaha, antara lain:

1. Pinjaman Modal

Peminjaman modal merupakan salah satu unit kegiatan usaha yang ada pada BUMK yang merupakan dana yang dipinjamkan oleh BUMK kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya baik usaha dibidang pertanian, peternakan, dan usaha kecil lainnya dengan batas maksimal yaitu 3 bulan saja. Adanya peminjaman modal pada BUMK ini telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, masyarakat tidak perlu meminjam ke bank dengan proses yang lama dan berbelit-belit.

2. Pendapatan Asli Kampung (PAK)

Tidak hanya kepada masyarakat, kontribusi yang diberikan BUMK di Kampung Terangun bagi PAK masih kurang. Seperti keterangan salah satu informan yang merupakan ketua BUMK menjelaskan bahwa kontribusi yang diberikan BUMK jika sesuai peraturan yaitu 35% untuk pembangunan desa, 15% untuk pengurus, 45% untuk pengembalian modal dan 5% untuk sosial dari Sisa Hasil Usaha (SHU) selama satu tahun. Namun pada kenyatannya kontribusi yang di berikan BUMK terhadap PAK kampung pada tahun 2017 hanya sebesar 5% saja ini dikarenakan BUMK masih dalam tahap pengembangan dan juga pengurus maupun pemerintah desa memfokuskan kepada pengembangan unit-unit usaha yang ada pada BUMK maupun membuka unit usaha yang baru seperti unit usaha pasar desa.

Dari keterangan-keterangan diatas kontribusi yang diberikan BUMK cukup baik, hal ini sejalan dengan pendapat (Ramadhana, 2013), yang menyatakan bahwa keberadaan BUMK memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa. Namun, kontribusi ini belum maksimal seperti yang diketahui masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui adanya unit peminjaman modal di BUMDes sehingga dampaknya hanya dirasakan oleh masyarakat yang meminjam modal saja, tidak hanya itu kontribusi BUMK dalam menyerap tenaga kerja maupun terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD Kampung) dirasa masih belum maksimal.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa minimnya partisipasi dan SDM yang kurang memadai menghambat kinerja BUMK. Hal ini sejalan dengan temuan Meigawati (2018) yang menyatakan bahwa implementasi program BUMK belum berjalan dengan baik. Faktor penghambatnya yaitu dari kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi Program BUMK kepada masyarakat.

Perencanaan pembangunan kampung merupakan suatu model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dan sikap masyarakat setempat serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Dari teori tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan kampung dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan desa. Peran masyarakat dalam hal ini adalah analisa mengenai apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggungjawab.

"Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya sampai pelaksanaannya, seperti ketika misalkan pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap kebutuhan, mereka hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, pembangunan jalan dan pembangunan madrasah diniyah misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan." (Hasil Wawancara Dengan Abu Kasim).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Abu Kasim pemberdayaan yang berlangsung di Kampung Terangun. Tujuan dari pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai mengena pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam menganalisis kebutuhan masyarakat sendiri untuk bersama disepakati dalam Musdus dan Musbangdes sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah. (Anwar, 2014).

Pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan yang lainnya di pedesaan kerap kali kurang berjalan dengan baik dan fenomena seperti ini berlangsung beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebut-sebut diakibatkan karena terbatasnya anggaran yang terdapat di setiap pemerintahan desa yang pada akibatnya Program-program yang dilaksanakan di Desa-desa tidak berjalan secara signifikan.

Selain itu tidak sedikit desa di Indonesia yang dikategorikan tertinggal. Disaat wilayah perkotaan gencar akan program pembangunan dan penataan kotanya, wilayah pedesaan seakan-akan kurang mendapat perhatian, mungkin hampir disemua sektor. Kota dengan segala kemajuannya semakin terus maju, sedangkan desa seakan akan belum ada perkembangan.

Alasan-alasan seperti itulah yang pada akhirnya pemerintah pusat mulai mengucurkan dana untuk setiap desa di Indonesia, yang disebut dengan Dana Desa (DD). Dana yang dikucurkan tersebut dalam pelaksanaannya melihat pada keadaan desa itu sendiri, yang pada hal ini juga akan memengaruhi pada besaran dana yang akan diterima oleh desa tersebut. Misalnya melihat pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan yang lainnya. Dana desa ini diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya kebijakan seperti ini, maka sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kampung termasuk kampung terangun untuk berbenah diri.

Sesuai dengan penjelasan diatas kini program pembangunan di Desa Terangun mulai dilaksanakan, perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pemerintah Desa Terangun sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Terangun itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Terangun melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Desa Terangun terutama setelah adanya dana desa ini secara perlahan telah melaksanakan aktifitas dan perbaikan desaBerbagai respon muncul dari masyarakat, terutama terhadap aktifitas program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Terangun.

Berbagai upaya memang telah coba dilakukan oleh Pemerintah Desa Terangun guna meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal pembangunan. Selain itu dalam pembangunan di Desa Terangun hanya baru sebatas pada ranah pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Dan kedepannya dana desa ini diharapkan betul-betul digunakan

untuk program-program pembangunan tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja, serta tepat dana desa ini tepat guna, dan tepat sasaran.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Chabib, 2015). Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam. Prinsip merupakan pokok dasar seseorang untuk berfikir atau bertindak berdasarkan azas tertentu. Kaitan antara azas dengan ekonomi Islam adalah cara berfikir dan bertindak secara ekonomi dengan menggunakan nilai-nilai Islam. Pemerintah kampung dalam pembangunan kampung seharusnya menerapkan beberapa prinsip ekonomi Islam antara lain:

1. Prinsip Tauhid
2. Prinsip Nubuwah
3. Prinsip Keseimbangan
4. Prinsip Kepemilikan
5. Prinsip Keadilan
6. Prinsip Masalah dan Manfaat
7. Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*) dan Tolong-menolong (*ta'awun*)

Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka, sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Adanya pembangunan infrastruktur dalam Islam memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan infrastruktur desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat desa baik dalam segi melakukan pekerjaan dan berdagang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah beribadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya.

Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat artinya pembangunan tersebut mengalami dampak yang positif serta menjadikan masyarakat sejahtera, dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan dan juga materi. Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan teori diatas, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Terangun untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah desa Terangun sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kampung Terangun berupaya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintahan kampung yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pemberdayaan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mandiri, memiliki keterampilan serta

kreatif dan berkompeten. Dalam pembangunan sarana dan prasana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian.

5. KESIMPULAN

Konsep pembangunan kampung memahami cara pelaksanaannya dengan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana maupun pembangunan perekonomian lewat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan-pelatihan dan lain-lain.

Rangkaian kegiatan pembangunan pekampungan terdiri dari sosialisasi, musyawarah program, pelaksanaan kegiatan dan pelatihan di kampung Terangun kecamatan telah berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada beberapa kendala-kendala yang terjadi.

Rangkaian strategi pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan terdiri dari perbaikan akses jalan, pembangunan pos pelayanan terpadu, menciptakan program kelompok tani, mendirikan badan usaha milik kampung dan lain-lain.

Adanya pembangunan infrastruktur dalam Islam memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun sosial.

Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah beribadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi, dan interaksi ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Azizah Rosfa Nur. 2017. *Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*, Lampung: Skripsi UIN Raden Intan.
- Angga Harahap. 2010. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara)*, Medan: Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Bintarto. 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Candra Kusuma Putra et al, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, vol 1, No. 6.
- Dede Rodin. 2015. Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'a. *Jurnal Economica UIN Walisongo*.
- Fatoni. 2014. Peran Misyakat (Micro Finance Syariah untuk Masyarakat) DPU (Dompot Peduli Umat) Daarut Tauhid dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Economica UIN Walisongo*.
- Herdiansyah Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Jayadinata dkk. 2006. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB.
- Maulana M. Indra. 2018. *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan)*, Lampung: UIN Raden Intan.
- Muthoriq dkk. Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nur Khoirin, et al. 2014. *Pemberdayaan Petani Kebun Pisang di Lahan Kosong Sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang*, Semarang: Laporan Karya Pengabdian Dosen UIN Walisongo Semarang.
- Qardhawi Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rodin Dede. 2015. Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'a. *Jurnal Economica UIN Walisongo*.
- Sholeh Chabib, Heru Rochansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokus Media.
- Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Yusuf Qardhawi. 2002. *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.